

EVALUASI PROGRAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN KUBU RAYA (Suatu Studi Kecamatan Rasau Jaya)

Oleh:
FERRY TRY ANANDA
NIM. E42012005

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : ferrytryananda@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah minimnya minat masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya khususnya, Kecamatan Rasau Jaya. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kecamatan Rasau Jaya. Untuk mengevaluasi program pembuatan akta kematian, peneliti menggunakan teori evaluasi yang mengarah pada proses yaitu menggunakan tipe evaluasi proses deskriptif, aspek yang digunakan yaitu : Fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan dan Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian ditingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terlaksana dengan baik, dari fasilitas, sumber daya informasi (sosialisasi), dan kebijakan sesuai dengan petunjuk. Namun ditingkat Kecamatan Rasau Jaya dan dua Desa yaitu Desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya I, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena fasilitas, sumber daya informasi (sosialisasi), dan kebijakan sesuai dengan petunjuk belum diterima oleh pihak desa, sehingga pelaksanaan kepengurusan akta kematian tidak bisa dilaksanakan, dan hal tersebut berdampak pada minimnya minat masyarakat dalam mengurus akta kematian di Kecamatan Rasau Jaya.

Kata-kata Kunci : Evaluasi, Proses, Akta Kematian

DEATH CERTIFICATE CREATION PROGRAM EVALUATION IN KUBU RAYA COUNTY (ONE STUDY RASAU JAYA SUBDISTRICT)

Abstract

Issues raised in this study is the lack of public interest in making the death certificate in Kubu Raya particularly at Rasau Jaya subdistrict. This thesis aims to evaluate the implementation of the death certificate making program at Rasau Jaya subdistrict. To evaluate a program of making death certificates, researcher used the theory of evaluation that lead to the process that is using a type of descriptive evaluation process, aspects that are used are: facilities, resources are used in the policy and the policy implemented in accordance with the instructions. This research uses descriptive qualitative research method. These results of this research show that the process of death certificate making program at Agency of Population and Civil Registration level has been performing well, facilities, information resources (socialization), and policies in accordance with the instructions. But, at Rasau Jaya subdistrict level and two villages consist of Rasau Jaya Umum Village and Rasau Jaya I Village, in the implementation, not in accordance with the technical guidelines and implementation, this was due to facilities, information resources (socialization), and policies in accordance with the instructions have not been received by the village, until the implementation of death certificate management can not be done, and it impacts on lack of community interest in death certificate making at Rasau Jaya subdistrict.

Keywords: Evaluation, Process, Death Certificate

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 Ayat (1) berbunyi : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pra Penelitian yang peneliti lakukan, ditemukannya permasalahan, bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih minim dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat suatu kebijakan tentang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam peraturan daerah tersebut berisi tentang aturan-aturan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Kabupaten Kubu Raya, salah satunya berkaitan dengan pencatatan kematian yang terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) – (5).

Di Kabupaten Kubu Raya sendiri, berdasarkan data penerbitan akta kematian pada tahun 2015, jumlah penerbitan akta kematiannya sebesar 700 terbitan (Berdasarkan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015)

Berdasarkan Pra Penelitian peneliti, dapat dijelaskan bahwa penerbitan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya, presentase penerbitan akta kematian di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Kubu Raya tersebut, menunjukkan ada 2 (dua) kecamatan yang presentase penerbitannya sangat rendah yaitu di Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Rasau Jaya.

Berdasarkan data kependudukan yang didapatkan peneliti, menunjukkan bahwa dua Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya tersebut presentase penerbitan akta kematiannya sangat kecil yaitu hanya 0,03% dari total jumlah penduduknya. Namun peneliti disini memilih satu sampel, yakni

Kecamatan Rasau Jaya yang presentase penerbitannya sangat kecil dan dijadikan wakil dari seluruh kecamatan dalam pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Rasau Jaya memiliki jumlah penduduk sebesar 30.436 jiwa dengan keseluruhan jumlah pembuatan akta kematian pada tahun 2015 hanya 11 terbitan akta kematian, namun berdasarkan data penduduk yang meninggal di Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2015, jumlah penduduk yang meninggal berjumlah 70 orang (Sumber : Profil Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2015).

Peneliti menyimpulkan, hasil Pra Penelitian ini dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat pada salah satu kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, minat masyarakatnya masih kurang untuk melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dan dibuatkan akta kematiannya, sehingga peneliti ingin mencari tahu permasalahannya dan melakukan evaluasi terhadap proses pembuatan akta kematian di Kecamatan Rasau Jaya. Kemudian juga ditemukan permasalahan yang dapat dijadikan

tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya, yaitu belum adanya data rekam jumlah penduduk yang meninggal di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dalam penerbitan akta kematian.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian dan peneliti tertarik untuk mengambil judul masalah yaitu "Evaluasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kabupaten Kubu Raya (Suatu Studi Kecamatan Rasau Jaya)".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan Rasau Jaya telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan latar belakang diatas adalah untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pelaksanaan Program Pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan Rasau Jaya.

4. Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan sumbangan pemikiran bagi dunia, ilmu pengetahuan pada bidang studi ilmu pemerintahan, khususnya pada pelayanan publik dalam proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian.

2.) Manfaat Praktis

a.) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran/ide kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk melakukan upaya alternatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan

Rasau Jaya, agar meningkatnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal

b.) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan, serta menambah daya fikir yang kritis, khususnya dalam bidang pemerintahan dan menerapkan teori-teori yang didapatkan pada masa perkuliahan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1.) Evaluasi

Menurut Yunanda (2009), pengertian evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

2.) Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009:14), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk faktual upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut dengan negara atau bangsa. Pernyataan diatas menegaskan, bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan atau kemunduran bagi suatu negara atau bangsa, keputusan yang dibuat negara khususnya pemerintah adalah bertujuan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

3.) Evaluasi Kebijakan Publik

Langbein (dalam Widodo,2006:116) mengemukakan bahwa, membedakan tipe riset evaluasi (*type of evaluation*

research) menjadi dua macam tipe, yaitu riset *process* dan riset *outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu mode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public policy implementation*), sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*).

Metode deskriptif menjadi penting dalam riset evaluasi, ketika kita sulit untuk menemukan atau membuat hubungan sebab akibat. Metode deskriptif berusaha menemukan, apakah semua program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Kemudian juga metode deskriptif, digunakan untuk mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat/keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata yang dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran

(*target group*) yang paling banyak atau paling sedikit.

Meskipun demikian, riset evaluasi ini berusaha melihat keberhasilan suatu kebijakan program, riset evaluasi ini menjadi *normative focus*.

Artinya, ada dampak (*impacts*) dari suatu program, sementara riset lain memfokuskan pada proses (*process*) manakala suatu program itu dilaksanakan. Riset yang memfokuskan pada proses yaitu riset proses yang senantiasa mendasarkan pada *guide line*, bagaimana prosedur dan administrasinya yang bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis. Berdasarkan penjelasan teori dan masalah diatas, maka fokus yang tepat dalam mengakat masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori evaluasi dengan tipe evaluasi deskriptif menurut Langbein, yang mengarah pada evaluasi proses. Tipe Evaluasi Deskriptif yaitu melihat pada

proses terdiri dari 4 (empat) aspek :

1. Fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan.
2. Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.
3. Derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan.
4. Manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target group*).

Berdasarkan 4 (empat) aspek yang ada di dalam tipe evaluasi deskriptif, berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, peneliti hanya mengambil 2 (dua) aspek saja dalam melakukan suatu evaluasi, sehingga dapat menjawab permasalahan pada pelaksanaan program pembuatan akta kematian.

Melihat pada prosesnya, maka peneliti ingin mengangkat masalah, yaitu evaluasi pada proses pelaksanaan Program Pembuatan Akta Kematian di

Kabupaten Kubu Raya (Suatu Studi Kecamatan Rasau Jaya), karena melihat fenomena yang peneliti lihat ialah masih minimnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian dan belum adanya rekam jumlah penduduk yang meninggal pada data penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

4.) Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Evaluasi Program Pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Kubu Raya (Suatu Studi Kecamatan Rasau Jaya) ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deksriptif, dengan analisa data secara kualitatif, artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu pendeksripsian tentang pelaksanaan program pembuatan akta kematian dalam proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Rasau Jaya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan terhadap Program Pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan Rasau Jaya, yang kemudian perlu adanya kajian untuk dievaluasi. Maka dari pada itu, peneliti membahasnya menggunakan teori evaluasi proses, yaitu dengan menggunakan tipe evaluasi deskriptif oleh Langbein (dalam Widodo 2006).

1. Fasilitas, Sumber Daya digunakan dalam Kebijakan di Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yang peneliti teliti dan wawancara, berkaitan dengan fasilitas dan sumber daya (sumber daya informasi) dalam kebijakan. Peneliti menyimpulkan, bahwa pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya yaitu tingkat kecamatan, mereka telah menerima sosialisasi tentang pembuatan akta kematian yang diberikan oleh pihak dukcapil. Namun ditingkat Desa di Kecamatan Rasau Jaya, dari kedua sampel desa

yang peneliti ambil yaitu Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya I (Satu), berkaitan dengan fasilitas dalam kepengurusan akta kematian masih belum diberikan, seperti blangko pembuatan akta kematian yang tidak tersedia di desa, dan sosialisasi yang masih belum diberikan oleh pihak kecamatan maupun dukcapil, sehingga pengurusan akta kematian belum terlaksana dan tidak berjalan dengan maksimal.

2. Kebijakan Dilaksanakan Sesuai dengan Petunjuk di Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yang peneliti teliti dan wawancara, berkaitan dengan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Peneliti menyimpulkan bahwa ditingkat kecamatan, pihak kecamatan tidak memiliki wewenang dalam kepengurusan akta kematian, sehingga untuk pengurusan akta kematian mereka tidak memiliki keterlibatan dalam pengurusannya. Namun akan tetapi di tingkat desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya, pada sampel dua desa yang peneliti ambil yaitu Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya I (Satu). Berkaitan dengan

kebijakan pembuatan akta kematian, kedua pihak desa tersebut belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan tentang pengurusan akta kematian dari pihak dukcapil maupun kecamatan, sehingga pelaksanaan pembuatan akta kematian belum terlaksana dan tidak berjalan dengan maksimal, karena pihak desa belum menerima informasi tentang pengurusan dan pentingnya kegunaan dari akta kematian tersebut.

3. Fasilitas, Sumber Daya digunakan dalam Kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan penjelasan informan yang peneliti teliti, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan fasilitas dan sumber daya (sumber daya informasi) dalam kebijakan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Peneliti menyimpulkan, bahwa pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya dari tingkat dukcapil, telah memenuhi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi fasilitas yang ada di Kantor Dinas Dukcapil.

Hal tersebut dibuktikan dengan penyediaan fasilitas seperti kondisi ruang tunggu dan loket pelayanan yang telah tersedia dan kondisinya cukup baik, namun kekurangannya hanyalah ruang tunggu yang kecil seperti penyediaan kursi yang terbatas dengan jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan tidak seimbang, sehingga sedikit kurang memberikan rasa nyaman ketika melakukan pelayanan karena harus berdiri dan duduk ditangga, namun akan tetapi semua itu tidak menghambat dalam proses pelayanan pembuatan akta kematian. Kemudian untuk sumber daya informasi (sosialisasi) pada pelaksanaan program pembuatan akta kematian, telah terlaksana yaitu pihak dukcapil telah turun ke kecamatan setahun sekali dalam anggaran, yaitu memberikan sosialisasi tentang pembuatan akta kematian dan diselangi dengan memberikan persyaratan-persyaratan, blangko F1 dan F2, dan Baleho-baleho yang berkaitan dengan pembuatan akta kematian. Sehingga dalam pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik dan berjalan dengan maksimal.

4. Kebijakan Dilaksanakan Sesuai dengan Petunjuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya pada tingkat dukcapil, dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, yaitu tersedianya SOP dan Alur Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian acuan pelaksanaan dalam pembuatan akta kematian telah berlandaskan hukum pada Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sehingga pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya terlaksana dengan baik dan berjalan dengan maksimal.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai proses pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kabupaten Kubu Raya khususnya Kecamatan Rasau Jaya, sebagai berikut :

- a.) Fasilitas dan sumber daya (sumber daya informasi) dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kematian, secara garis besar dianggap sudah memenuhi standar minimal untuk pembuatan akta kematian di Dukcapil Kabupaten Kubu Raya. Artinya proses pelayanan pembuatan akta kematian dianggap sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
- b.) Fasilitas dan sumber daya (sumber daya informasi) di tingkat desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya, yaitu desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya I (Satu). Fasilitas dalam kepengurusan akta kematian masih belum diberikan oleh pihak dukcapil, seperti blangko pembuatan akta kematian yang tidak tersedia di desa, dan sosialisasi yang masih belum diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal dalam kepengurusan akta kematian.
- c.) Petunjuk pelaksanaan program pembuatan akta kematian secara garis besar dalam proses pelaksanaannya di tingkat dukcapil, telah terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan, diantaranya yaitu tersedianya SOP dan Alur pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, kemudian dalam pelaksanaannya berlandaskan hukum pada Undang-undang No. 24 Tahun 2013 dan Perda Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d.) Petunjuk pelaksanaan program pembuatan akta kematian ditingkat desa yaitu desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya I (Satu), dalam pelaksanaan pengurusan akta kematian dapat dikatakan belum sama sekali mengikuti petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh

pemerintah, hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya sarana yang mendukung dalam proses pembuatan akta kematian di kedua desa tersebut, seperti blangko, syarat-syarat, dan poster/pengumuman yang berkaitan dengan akta kematian, sehingga pelaksanaan program pembuatan akta kematian, belum dilaksanakan di tingkat desa.

D. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak Kecamatan Rasau Jaya agar dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam proses pelaksanaan pembuatan akta kematian, yaitu sebagai berikut :

- a.) Perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada pihak kecamatan, desa, maupun masyarakat dari disdukcapil dalam proses pembuatan akta kematian, untuk jangka waktunya perlu ditambahkan yaitu diberikan setiap 6 bulan

sekali, dan terakhir memberikan penjelasan tentang pentingnya kegunaan akta kematian bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga diharapkan minat masyarakat untuk membuat akta kematian dapat meningkat dan data yang melaporkan akta kematian menjadi valid dalam data kependudukan di Kabupaten Kubu Raya khususnya berkaitan dengan data kematian penduduk.

- b.) Diberikannya pelatihan dari pihak dukcapil kepada pegawai/petugas yang bertugas sebagai pelaksana dalam proses pembuatan akta kematian diseluruh desa diruang lingkup Kecamatan Rasau Jaya, sehingga proses pengurusan administrasi kependudukan khususnya akta kematian dapat dikuasai dan meminimalisir terjadinya kesalahan terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan akta kematian.
- c.) Perlunya penegasan dari pihak dukcapil untuk melakukan

pengawasan kepada pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa dalam pelaksanaan pembuatan akta kematian. Agar pelaksanaan program pembuatan akta kematian di Kecamatan Rasau Jaya dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan maksimal, sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya, khususnya di Kecamatan Rasau Jaya.

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa kendala dan juga mengalami beberapa keterbatasan selama penelitian, adapun kendala dan keterbatasan tersebut, antara lain :

a.) Kesulitan informan untuk memperoleh informasi, karena kesibukan dan tugas lain yang dialami oleh informan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Rasau Jaya, Desa Rasa Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya I sebagai aparatur pemerintahan,

mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing pada saat bekerja, sehingga peneliti harus menyesuaikan waktu untuk mendapatkan informasi kepada informan yang dijadikan subyek dalam penelitian ini.

b.) Kemudian jarak lokasi penelitian yang cukup jauh, menjadikan kendala peneliti untuk mendapatkan informasi dan data pada permasalahan peneltian, karena harus menyesuaikan waktu yang diberikan oleh pihak kampus dalam pelaksanaan penelitian.

c.) Terbatasnya waktu penelitian yakni 12 (dua belas) hari, terhitung juga dengan hari libur di dalamnya, sehingga peneliti kesulitan untuk memperoleh informasi yang mendalam berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d.) Faktor yang dialami oleh peneliti sendiri juga menjadi keterbatasan lainnya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian ilmiah pertama yang dilakukan oleh peneliti, sehingga menurut peneliti masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti berharap kedepannya untuk

penelitian selanjutnya agar dapat disempurnakan kembali.

F. REFERENSI

1. Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

-----, 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung & Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta.

Crawford, John. 2000. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Service*. London : Aslib, the association for information management and information management international.

Echols, John M dan Shadily, Hassan. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Dimyanti dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Hikmat, Harry. 2004. *Aplikasi sistem monitoring dan evaluasi perlindungan sosial*. Jakarta : Bappenas.

John M Echols dan Hassan Shadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Indonesia

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.

Wibawa, Samoedra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.

-----, 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi kasus)*. Jakarta : Penerbit PT. Buku Seru.

Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008.

Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Keputusan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

3. Skripsi

Rico, Albertus. 2014. *Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Di Kabupaten Sekadau*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Setiadi, Rifki. 2015. *Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Rujukan Elektronik

bpn-kuburaya.com “Peta Kecamatan Rasau Jaya”

5. Dan Lain-lain

Rekapitulasi Jumlah Kematian Dan Jumlah Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan Per Semester I Tahun 2015 Kabupaten Kubu Raya.

Rekapitulasi Kematian Penduduk Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2015
Profil Kecamatan Rasau Jaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ferry Try Ananda
NIM / Periode Lulus : E42012005 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : ferrytrieananda@yahoo.com / 089692005664

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PROGRAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
(SUATU STUDI KECAMATAN RASAU JAYA)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 13 Desember 2016

(Ferry Try Ananda)